

KEPEMILIKAN TANAH AHLI WARIS WNA PERSPEKTIF MAQĀSĪD  
AL-SYARI'AH JASSER AUDA' (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 5  
TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA)

SKRIPSI



Oleh :

NUR AWALIAH REZKY

NIM. 2018170021242025

Dosen Pembimbing :

Fitrotin Jamilah, M. H. I.

NIDN. 2101118103

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

2022

## ABSTRAK

Rezky, Nur Awaliah. 2022. *Kepemilikan Tanah Ahli Waris WNA Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah Jasser Auda' (Studi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim. Dosen Pembimbing : Fitrotin Jamilah, M. H. I.

---

---

Kata Kunci : Kepemilikan Tanah, Waris, *Maqāsid as-Syari'ah Jasser 'Auda* dan UUPA

Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Kepemilikan Tanah Ahli Waris WNA Maqāsid Al-Syari'ah Jasser 'Auda (Undang-Undang . Pada penelitian ini juga akan membahas lebih lanjut mengenai terhalangnya hak waris tanah bagi anak perkawinan anak campuran pada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 21 ayat 3 ditinjau dari segi *Maqāsid al-Syari'ah* konsep *Jasser 'Auda* .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan kualitatif berbasis Perundang-undangan yang mana sumber datanya berasal dari Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 , Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam serta arikel, buku dan skripsi yang mendukung untuk penelitain ini.

Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi dan informasi serta transportasi mengakibatkan terjadinya pernikahan lintas negara atau yang biasa disebut dengan perkawinan campuran. Hal ini juga berdampak pada waris baik dari harta yang di tinggalkan maupun ahli warisnya. Di Indonesia hukum waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan adat. Namun, bagaimana jika si ahli waris dari perkawinan campuran ini berbeda kewarganegaraan dengan orang tuanya. Maka, dari itu akan berlaku Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 21 ayat 3. Di dalam undang-undang ini melarang tentang kepemilikan tanah bagi warga negara asing baik melalui pewarisan dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya untuk melindungi hak masyarakat umum dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi, *maṣlahah* dan *mudaratnya*.